

Kasus Korupsi Haji KPK Ungkap Peluang Periksa Jokowi

Jakarta, MIMBAR - Belum ada tanda-tanda Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memanggil dan memeriksa mantan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam rangka mengusut kasus korupsi kuota haji 2023-2024.

Ketua KPK Setyo Budiyo menegaskan, pemanggilan Jokowi akan tergantung pada kebutuhan penyidikan. "Pemeriksaan itu dilakukan manakala diperlukan dan ada relevansi dengan perkaranya," kata Setyo Budiyo di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu, 28 Januari 2026.

■ Bersambung ke Hal 11



Restrukturisasi Kredit Korban Bencana Sumatra Tembus Rp12,58 T

Medan, MIMBAR - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat realisasi restrukturisasi kredit bagi debitur terdampak bencana di wilayah Sumatra mencapai Rp12,58 triliun hingga akhir Desember 2025.

Ketua Dewan Komisiner OJK Mahendra Siregar mengatakan, restrukturisasi kredit tersebut diberikan kepada 237.083 nasabah di Provinsi Aceh, Sumatra Barat, dan Sumatra Utara melalui kebijakan relaksasi.

■ Bersambung ke Hal 11

Kim Jong Un Perkuat Senjata Nuklir

Medan, MIMBAR - Pemimpin Korea Utara Kim Jong Un memperkuat senjata nuklir negaranya di tengah konflik yang memanasi di sejumlah wilayah.

Ia menegaskan penguatan kemampuan senjata nuklir itu dapat menimbulkan "penderitaan mental yang amat menyiksa" bagi musuh-musuh Korut.

Menurut Korean Central News Agency (KCNA), Kim didampingi oleh pejabat senior Korut serta putrinya saat menyaksikan uji tembak sebuah peluncur roket berkaliber besar yang menembakkan empat misil.

Foto-foto yang dirilis media pemerintah juga

■ Bersambung ke Hal 11



**Jadwal
Salat**

10 SYA'BAN 1447 H

Imsak	: 05:11 WIB	Ashar	: 16:03 WIB
Subuh	: 05:21 WIB	Maghrib	: 18:39 WIB
Zuhur	: 12:40 WIB	Isya	: 19:51 WIB

■ Untuk kota Medan sekitarnya

Hidayah Ketika Orang Baik Disingkirkan

Oleh Dr. A. Rasyid, MA

Kesaksian Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) di Pengadilan Tipikor bukan sekadar pelengkap berkas perkara dugaan korupsi minyak mentah PT Pertamina. Ia telah berubah menjadi cermin yang memantulkan persoalan lebih besar: krisis meritokrasi dan keberanian moral dalam pengelolaan BUMN.

Ahok menyebut dua mantan direksi subholding Pertamina Joko Priyono dan Mas'ud Khamid sebagai figur terbaik yang pernah dimiliki perusahaan pelat



■ Bersambung ke Hal 11



MUI Sarankan RI Mundur dari Board of Peace

Jakarta, MIMBAR - Pemerintah Indonesia diharapkan mundur dari keanggotaan dalam Board of Peace (BoP)/ Dewan Perdamaian, sebuah badan internasional yang dibentuk untuk mengawal stabilisasi dan rehabilitasi pascakonflik di Gaza.

Demikian penegasan Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Bidang Hubungan Luar Negeri dan Kerja Sama Internasional, Prof. Sudarnoto Abdul Hakim dalam acara diskusi bertajuk "Indonesia Gabung

Board of Peace, Untung atau Buntung?", yang digelar di Jakarta Pusat, Selasa 27 Januari 2026.

"Seperti statement saya yang sudah beredar secara luas di mass media, kami MUI meminta atau menganjurkan kepada pemerintah, mundur saja dari keanggotaan Board of Peace," kata Prof. Sudarnoto.

Apalagi, kata Prof. Sudarnoto, Board of Peace sebetulnya kamufase saja. Menurutnya, perdamaian tidak mungkin

■ Bersambung ke Hal 11

Dugaan Korupsi Minyak Mentah Pertamina Ahok Minta Jaksa Periksa Erick Thohir & Jokowi



Jakarta, MIMBAR - Mantan Komisaris Utama PT Pertamina (Persero), Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok mendorong jaksa penuntut umum (JPU) untuk memeriksa mantan Menteri BUMN Erick Thohir hingga Presiden ke-7 RI Joko Widodo, terkait dugaan korupsi minyak mentah PT Pertamina. Khususnya soal pencopotan dua direksi anak usaha Pertamina yang dinilainya berintegritas.

Pernyataan itu disampaikan Ahok saat bersaksi dalam sidang lanjutan perkara dugaan korupsi pengelolaan minyak mentah Pertamina di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Selasa (27/1).

Dua nama yang dimaksud adalah Joko Priyono dan Mas'ud Khamid, masing-masing mantan direksi di subholding Pertamina, yakni Kilang Pertamina Internasional (KPI) dan Pertamina Patra Niaga (PPN).

Jaksa penuntut umum (JPU) mempertanyakan status keduanya yang disebut Ahok telah dicopot dari jabatan.

"Ini saya ingin menanyakan penegasan ya, masih di poin 10 huruf a. Dalam keterangan saudara ada dua nama, Pak Joko Priyono dan

■ Bersambung ke Hal 11

Update Korban Longsor Cisarua 50 Kantong Jenazah, 34 Teridentifikasi



DVI Polri telah menerima 50 body pack atau kantong jenazah korban longsor di Cisarua, Bandung Barat. Berdasarkan data terbaru Selasa (27/1) malam, tim sudah mengidentifikasi 34 jenazah.

"Dari jumlah tersebut kami telah berhasil mengidentifikasi 34 jenazah. Jumlah ini bertambah dari sebelumnya 30 jenazah," ungkap Kabid Humas Polda Jabar Kombes Pol Hendra Rochmawan, yang ditulis pada Rabu (28/1).

Ia menjelaskan, empat jenazah yang baru berhasil diidentifikasi masing-masing tercatat sebagai post-mortem 41 atas nama Awangsih (70), teridentifikasi melalui properti, tanda medis, dan data gigi.

Post-mortem 42 atas nama Wati alias Enok (58),

teridentifikasi berdasarkan sidik jari dan tanda medis. Post-mortem 43 atas nama Bayu Nurcahya (33), teridentifikasi melalui sidik jari dan data gigi. Serta post-mortem 44 atas nama Epon (30), teridentifikasi berdasarkan sidik jari, gigi, dan data medis.

Iwansyah menegaskan, proses identifikasi akan terus dilanjutkan melalui tahapan post-mortem dan ante-mortem hingga seluruh jenazah berhasil dipastikan identitasnya.

Ia menambahkan, hingga Selasa sore sebanyak 30 jenazah yang telah teridentifikasi sebelumnya sudah diserahkan kepada pihak keluarga. Termasuk empat jenazah yang baru teridentifikasi.

155 Jiwa Terdampak

Sementara itu, Kepala Basarnas Mohammad Syafii mengatakan jumlah warga terdampak yang dari semula 34 KK dengan 133 jiwa, menjadi 35 KK dengan 155 jiwa. Dari jumlah itu, 75 di antaranya selamat dan 80 sisanya masih dalam proses pencarian.

"Di mana kalau tadi pagi informasi terakhir yang saya konfirmasi bahwa telah teridentifikasi 27 jenazah yang sudah diserahkan kepada keluarga," kata Syafi'i usai rapat di Komisi V DPR, Selasa sore.

■ Bersambung ke Hal 11



KPK Minta Alat Canggih ke DPR

Agar OTT Lebih Masif

Jakarta, MIMBAR - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) meminta tambahan anggaran dalam rapat kerja dengan Komisi III DPR agar operasi tangkap tangan (OTT) lebih masif dilakukan.

Wakil Ketua KPK, Fitroh Rohcahyanto mengatakan, sejumlah alat yang dimiliki KPK saat ini telah usang. Menurut Fitroh, tambahan anggaran itu akan digunakan untuk pembelian alat. Namun, Fitroh tak

■ Bersambung ke Hal 11



■ Apa berani ?
■ Hehehe ...